

# Pengembangan Madrasah sebagai Pendidikan untuk Semua

Muzhoffar Akhwan<sup>1</sup>

## Abstract

*Since the early 20<sup>th</sup> century, madrasah with its independent characteristics is accepted by people gradually, as one of the Islamic education which plays an important role in the development and improvement of education quality in Indonesia. However its existence which is managed by people as much as 96% made it difficult to get its right to be supervised based on the letter of decision from the Ministry of Religion. The government's aid is very important for process of modernizing the school. The madrasah system was related to the school Islamic identity in facing the competition of education in global era.*

**Keyword:** *Islamic education, madrasah, education quality.*

## A. Pendahuluan

Kajian kependidikan Islam yang dilakukan oleh Karel Steenbrink dalam *Pesantren, Madrasah dan Sekolah* (1986) bersifat historis. Steenbrink dalam kajiannya berhasil mengungkap perkembangan historis lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren, yang kemudian diikuti dengan munculnya madrasah dan sekolah, serta dampak kehadiran madrasah dan sekolah terhadap pesantren. Di antara dampak tersebut adalah kemunculan kelompok fungsional baru dalam lapisan masyarakat Muslim, seperti “guru agama modern” yang memainkan fungsi-fungsi yang relatif berbeda dengan kelompok fungsional yang dilahirkan lembaga-lembaga pendidikan “tradisional” seperti pesantren.

Madrasah adalah hasil perkembangan modern dari pendidikan

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

pesantren yang secara historis, jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia, lembaga pendidikan Islam yang ada adalah perantren yang memusatkan kegiatannya untuk mendidik para santrinya mendalami ilmu agama. Ketika pemerintah Belanda memerlukan tenaga terampil untuk membantu administrasi pemerintah jajahan di Indonesia, maka diperkenalkanlah jenis pendidikan yang berorientasi pekerjaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, kebutuhan akan tenaga terdidik dan terampil untuk menangani administrasi pemerintahan sangat mendesak. Untuk itu pemerintah memperluas pendidikan model Barat yang dikenal dengan sekolah umum, sedangkan umat Islam santri berkeinginan untuk memmodern lembaga pendidikan mereka dengan mendirikan madrasah.

Perbedaan utama madrasah dengan pesantren menurut Furchan (2004: 36) terletak pada sistem pendidikannya. Madrasah menganut sistem pendidikan formal (dengan kurikulum nasional, pemberian pelajaran dan ujian yang terjadual, bangku dan papan tulis seperti umumnya sekolah model Barat) sedangkan pesantren menganut sistem non-formal (dengan kurikulum yang sangat bersifat lokal, pemberian pelajaran yang tidak seragam, sering tanpa ujian untuk mengukur keberhasilan belajar siswa). Penambahan mata pelajaran umum di madrasah ini tidak berjalan seketika, melainkan terjadi secara berangsur-angsur, yang pada awalnya, kurikulum madrasah masih 100% berisi pelajaran agama, tetapi sudah mengadopsi sistem pendidikan modern seperti bangku, papan tulis, ulangan, ujian. Lulusan madrasah saat itu tidak bisa melanjutkan pelajarannya ke sekolah umum yang lebih tinggi. Orangtua yang ingin mendidik anaknya dalam ilmu agama dan ilmu umum terpaksa harus menyekolahkan anaknya di dua tempat, sekolah umum dan madrasah.

Sejak awal abad 20 gerakan reformasi Muslim melakukan reformasi pendidikan Islam untuk menjawab tantangan kolonialisme dan ekspansi Kristen, maka dimunculkan dua bentuk kelembagaan pendidikan modern Islam; *pertama*, sekolah umum model Belanda tetapi diberi muatan pengajaran Islam; *kedua*, madrasah modern, yang secara terbatas mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda. Model kedua ini yang selanjutnya lebih dikenal sebagai salah satu model pendidikan Islam di Indonesia.

Dengan diterbitkannya surat keputusan bersama tiga menteri (Menag, Mendikbud, dan Mendagri) tahun 1975 yang menetapkan bahwa lulusan madrasah dianggap setara dengan lulusan sekolah

umum, lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah umum yang lebih tinggi, dan siswa madrasah boleh pindah ke sekolah umum yang sama jenjangnya. Demikian pula sebaliknya. Kompensasi dari kesetaraan itu adalah bahwa 70% dari kurikulum madrasah harus berisi mata pelajaran umum. Bahkan, berdasarkan kurikulum madrasah 1994, kurikulum madrasah harus memuat 100% kurikulum sekolah umum. Sehingga madrasah dikategorikan sebagai Sekolah Umum yang Berciri Islam. Meskipun kurikulum 1994 telah diperbarui dengan orientasi kepada target hasil belajar, dan bukan pada proses pembelajarannya, sehingga guru diberi wewenang untuk berimprovisasi dengan kurikulum yang sudah disusun, mengatur alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, menentukan metode, penilaian, dan sarana pembelajaran.

Dengan dimasukkannya madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional, maka ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah umum yang setingkat, lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas, dan siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang setingkat, maka madrasah sebetulnya dapat dijadikan sebagai pendidikan alternatif dalam menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia.

## **B. Madrasah dalam Konteks Pendidikan Nasional**

Ciri khas madrasah lebih dari hanya sekedar penyajian mata pelajaran agama. Artinya, ciri khas tersebut bukan hanya sekedar menyajikan mata pelajaran agama Islam di dalam lembaga madrasah tetapi yang lebih penting ialah perwujudan dari nilai-nilai keislaman di dalam totalitas kehidupan madrasah. Suasana lembaga madrasah yang melahirkan ciri khas tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (1) Perwujudan nilai-nilai keislaman di dalam keseluruhan kehidupan lembaga madrasah; (2) Kehidupan moral yang beraktualisasi, dan (3) Manajemen yang profesional, terbuka, dan berperan aktif dalam masyarakat (Tilaar, 2004: 179).

Dengan suasana madrasah yang demikian melahirkan budaya madrasah yang merupakan identitas lembaga pendidikan madrasah. Otonomi lembaga pendidikan madrasah hanya dapat dipertahankan apabila madrasah tetap mempertahankan basisnya sebagai pendidikan yang berbasiskan masyarakat (*community-based education*). Dari sini akan lahir kurikulum yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia baru yang demokratis.

Keberadaan madrasah sebagai sub-sistem pendidikan nasional perlu dipertahankan dan dikembangkan. Pendidikan madrasah mampu memberikan sumbangan yang signifikan jika disertai dengan metodologi modern dan Islami. Untuk itu diperlukan guru yang mampu mendidik dan mengajar dengan metodologi yang sesuai dengan tantangan zaman peserta didik.

Masuknya madrasah sebagai sub-sistem pendidikan nasional mempunyai berbagai konsekuensi antara lain dimulainya suatu pola pembinaan mengikuti satu ukuran yang mengacu pada sekolah-sekolah pemerintah. Keuntungan positif yang diperoleh melalui UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional serta PP No. 28 Tahun 1990 telah melahirkan berbagai kendala Dualisme pembinaan antara Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terus berlangsung. Keamburadulan manajemen pendidikan dasar terbias juga dalam pembinaan madrasah di bawah Departemen Agama. Selama 10 tahun lebih sejak lahirnya UU No. 2 Tahun 1989. Penegasan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 30 (2) dinyatakan: Pendidikan Keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Ternyata tidak secara otomatis dapat mengangkat citra madrasah sebagai lembaga pendidikan alternatif, kecuali beberapa madrasah khusus berkualitas tinggi binaan masyarakat.

Madrasah yang pada umumnya lahir dari strata masyarakat miskin menyebabkan suatu keinginan untuk menegerikan madrasah-madrasah. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena mempunyai segi-segi positif antara lain adanya kucuran dana pemerintah antara lain melalui INPRES SD, INPRES Wajib Belajar. Demikian juga manajemen madrasah mendapat bantuan pemerintah dan mungkin pula memperoleh tenaga guru negeri yang diperbantukan. Banyak perkembangan baru baik dalam sistem maupun kelembagaan madrasah dalam hubungannya dengan sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Termasuk di sini, misalnya eksperimen Madrasah Aliyah Program Khusus MA-PK (Azra, 1999: 89).

### **C. Wacana Madrasah Modern dalam Persaingan Global**

Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia akibat kemajuan-kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi,

terutama di bidang telekomunikasi dan transportasi. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi kepentingan bangsa dan Negara. Dampak positif, misalnya kita semakin mudah memperoleh informasi dari luar dan dapat membantu kita menemukan alternatif baru dalam usaha memecahkan masalah yang kita hadapi. Dampak negatifnya adalah masuknya informasi-informasi yang yang tidak kita perukan atau bahkan dapat merusak tatanan nilai yang selama ini kita anut dan gejala bahwa anak dari masyarakat tingkat atas memperoleh kesempatan belajar pada sekolah-sekolah terbaik dan mampu belajar di perguruan-perguruan bermutu, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan anak dari lapisan bawah tidak memperoleh hal yang demikian itu bahkan banyak yang *drop out*.

Madrasah, dalam konteks mempersiapkan peserta didik menghadapi perubahan zaman akibat globalisasi ini memiliki peran yang amat penting. Keberhasilan madrasah dalam menyiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan yang lebih kompleks akan menghasilkan lulusan yang yang memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi pemimpin umat, pemimpin bangsa yang ikut menentukan arah perkembangan bangsa ini.

Dalam kaitannya dengan era globalisasi dan perdagangan bebas yang penuh dengan persaingan, madrasah juga harus mempersiapkan peserta didiknya untuk siap bersaing apa saja yang mereka masuki. Hal ini dimaksudkan agar lulusan madrasah tidak terpinggirkan oleh lulusan sekolah umum dalam perebutan tempat dan peran dalam gerakan pembangunan bangsa. Terbukanya peluang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi umum harus dimanfaatkan oleh madrasah sebaik mungkin dan harus meningkatkan kualitas pelajaran ilmu eksakta seperti matematika, fisika, dan biologi. Madrasah harus mendorong peserta didiknya untuk mau bekerja di bidang ekonomi, teknik, dan ilmu eksakta murni agar bidang tersebut tidak hanya dikuasai oleh lulusan nonmadrasah yang belum tentu memiliki mental keagamaan yang kuat.

Agar lulusan madrasah memiliki wawasan global, yang memandang bahwa seluruh muka bumi milik Allah ini adalah tempat mengabdikan, maka madrasah pun harus memiliki wawasan global. Bagaimana mungkin madrasah yang tidak memiliki wawasan global dapat menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan global? Madrasah harus mempersiapkan peserta didiknya dapat melanjutkan studi dan bekerja di luar negeri. Untuk itu, maka penguasaan keterampilan berbahasa asing (terutama Arab dan Inggris) menjadi amat penting, demikian pula pengenalan budaya dan

bangsa asing. Walhasil, sosok yang diharapkan mampu menghadapi globalisasi memiliki berbagai kecerdasan di dalam dirinya, baik itu kecerdasan fisik, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Dengan demikian, jelaslah bahwa manusia “**cerdas, kreatif, dan beradab**” adalah sosok yang sangat dibutuhkan pendidikan Islam, termasuk pendidikan madrasah untuk menghadapi globalisasi (Ma’arif, 2007: 123).

Dengan kompetensi lulusan yang merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati tersebut, maka madrasah umumnya merupakan pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*) memiliki basis yang kuat, karena berasal dari dan untuk rakyat, serta memiliki nilai kesempurnaan yang bersifat humanistik dan ketuhanan, yaitu proses pendidikan yang lebih memperhatikan aspek potensi manusia sebagai makhluk sosial, dan makhluk religius, ‘*abdullah* dan *khalifatullah*, serta sebagai individu yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mengembangkan potensi-potensinya.

#### **D. Mempersiapkan Madrasah Berkualitas, Responsif dan Adaptif**

Kualitas pendidikan menurut Danim (2003: 80), tidak semata-mata diukur dari mutu keluaran pendidikan secara utuh (*education outcomes*) akan tetapi dikaitkan dengan konteks di mana mutu itu ditempelkan dan berapa besar persyaratan tambahan yang diperlukan untuk itu. Misalnya, seorang lulusan Madrasah Aliyah untuk menduduki dunia kerja tidak perlu mendapatkan pelatihan tambahan sebelum memberikan layanan di tempat kerjanya, berarti ia adalah lulusan yang lebih bermutu daripada yang masih harus menempuh pelatihan pra penempatan dengan spesifikasi yang sama. Kualitas pendidikan juga bisa diukur dari besarnya kapasitas layanan pendidikan dalam memenuhi *customers needs* dikaitkan dengan besarnya pengorbanan yang diperlukan untuk itu, seperti biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat atau pemerintah, lama belajar, dan biaya-biaya tidak langsung.

Kehadiran PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) patut disyukuri, karena dapat berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas melalui Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Kualitas pendidikan



dapat dilihat dari isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut hendaknya dimulai dengan upaya membangun komitmen bersama dan diorientasikan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang terlibat di dalamnya.

Tantangan yang dihadapi madrasah dalam menjalankan misinya tidaklah kecil. Hal ini disebabkan: *pertama*, perubahan orientasi pendidikan masyarakat. Persiapan menuju era industrialisasi telah menyebabkan orientasi pendidikan masyarakat berubah dari 'belajar untuk mencari ilmu' menjadi 'belajar sebagai persiapan memperoleh pekerjaan'. Hal ini sebagai dampak dari makin tersebarnya pendidikan Barat di Indonesia yang sejak awal memang memang berorientasi pada 'mendapatkan pekerjaan'. Kecenderungan ini sudah melanda dunia karena, pendidikan model Barat inilah yang diadopsi di hampir seluruh negara di dunia. Perubahan orientasi ini membuat sekolah umum, yang memberikan pendidikan umum lebih banyak, lebih menarik minat orangtua daripada pesantren atau madrasah; *kedua*, pendidikan umum di mata masyarakat pada umumnya lebih diutamakan daripada pendidikan keagamaan. Ini tercermin dalam kurikulum 1994 yang prosentase pendidikan agamanya semakin dikurangi.

Madrasah yang semula mengutamakan pelajaran agama daripada pelajaran umum, sering menjadi pontang-panting mengejar ketertinggalan mereka dari kekolah umum di bidang pelajaran umum dan *ketiga*, kualitas layanan pendidikan yang diberikan oleh mayoritas madrasah masih dinilai lebih rendah daripada layanan pendidikan yang diberikan oleh sebagian sekolah umum, apalagi yang negeri. Penyebab kekurangmutuan ini bermacam-macam: disebabkan oleh manajemen (pengelolaan) pendidikannya yang kurang bagus, kualitas tenaga pengajarnya yang kurang baik, kekurangan dana operasional sehari-hari.

Tuntutan masyarakat Indonesia "Baru", antara lain demokratisasi pendidikan yang memupuk lahirnya tingkah laku peserta didik yang demokratis, hubungan yang demokratis antara guru dan peserta didik demi perkembangan berpikir yang kreatif, pendidikan agama yang membentuk nilai-nilai moral serta memperkuat iman dan takwa, menguasai iptek, serta memupuk kerja sama dalam persaingan sebagaimana dituntut oleh masyarakat global. Namun demikian, nilai-nilai tersebut cenderung menghilang dan diarahkan kepada uniformitas yang dituntut oleh system pendidikan yang

diselenggarakan oleh pemerintah yang sentralistik. Oleh karena itu, reposisi madrasah ditujukan berkembangnya identitas lembaga tersebut yang pada akhirnya akan melahirkan sosok yang memiliki identitas karena pembinaan madrasah dengan ciri khasnya (Tilaar, 2003: 173).

Secara substansional, moralitas merupakan aturan, kaidah baik dan buruk, simpati atas fenomena kehidupan dan penghidupan orang lain, dan keadilan dalam bertindak. Manusia bermoral berarti manusia yang menjadi pribadi yang utuh secara jasmani dan rohani, serta mengetahui bagaimana seharusnya dia bertindak untuk mengetahui, dan bagaimana seharusnya dia bertindak untuk menjadi pribadi yang ideal di mata masyarakat. Mereka ini adalah orang-orang yang keseharian hidupnya bermaslahat bagi individu dan anggota masyarakat pada umumnya. Masalah ini menjadi fokus perhatian madrasah dalam menjaga moralitas peserta didik.

Masalah desentralisasi atau otonomi daerah merupakan nilai-nilai yang melekat di dalam kehidupan madrasah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah sudah tentu prinsip-prinsip manajemen modern perlu dikembangkan untuk menghimpun segala aspirasi masyarakat yang hidup di daerah otonom yang dimaksud untuk memberdayakan lembaga kemasyarakatan. Salah satu potensi besar di dalam melaksanakan otonomi pendidikan di daerah adalah pengalaman yang dimiliki oleh pendidikan madrasah, karena madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*).

Munculnya kebijaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dalam bidang pendidikan bertujuan untuk memberikan peluang kepada peserta didik untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat. Manajemen desentralisasi memberi keuntungan pada madrasah melaksanakan Proses Belajar Mengajar sesuai dengan kebutuhan yang dikondisikan untuk kebutuhan lokal.

Konsep *community-based education* atau gerakan “privatisasi” di bidang pendidikan, tidaklah identik dengan tereduksinya peran pemerintah dalam bidang pendidikan, apalagi dihilangkan sama sekali. Di Indonesia, ada perundang-undangan yang relevan telah menggariskan bahwa ada dua kelompok penyelenggara pendidikan formal, yaitu pemerintah dan masyarakat. Istilah “privatisasi” atau “swastanisasi” pendidikan harus diberi makna bahwa peran masyarakat harus semakin besar di dalamnya, khususnya di bidang pendanaan, perencanaan program, pengawasan, evaluasi, kendali mutu, akuntabilitas, dan sebagainya.



## E. Partisipasi dan Kepedulian Stakeholders kepada Madrasah

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang hidup dari, oleh, dan untuk masyarakat belum mendapat sentuhan pikiran dan tangan kita semua. Peningkatan mutu tidak akan terealisasi tanpa andil semua pihak. Untuk itu, demi peningkatan mutunya maka madrasah perlu dibantu, dibela dan diperjuangkan. Prioritas utama pembangunan madrasah adalah menciptakan citra di masyarakat bahwa madrasah yang bersangkutan memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik. Hal ini penting karena citra ini akan memengaruhi pilihan masyarakat apakah akan mengirimkan anaknya ke madrasah tersebut atau tidak dan ini berarti masuk atau tidaknya dana operasional madrasah. Citra ini dapat diciptakan dengan cara antara lain penampilan gedung yang menarik, tim olah raga atau kesenian yang sering menang dalam lomba, seragam sekolah yang menarik, guru-guru yang berkualitas, disiplin sekolah yang diterapkan, dan hasil Unas yang baik.

Rasanya tidak adil, kalau pemerintah atau pemegang kebijakan pendidikan Islam menuntut lebih banyak peranan masyarakat, khususnya dari segi sumber daya dan finansial. Justru lebih fair dan adil kalau masyarakat menuntut peranserta yang lebih banyak dari pihak pemerintah. Apalagi kesan masyarakat terhadap pemerintah cenderung “menganaktirikan” madrasah, khususnya dari segi anggaran dan pembinaan. Meski demikian, peranserta masyarakat dalam pemberdayaan madrasah bukan tidak bisa dituntut lagi. Secara garis besar peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan itu dapat dikerangkakan sebagai berikut: *pertama*, peningkatan peranserta masyarakat dalam pemberdayaan manajemen pendidikan, yaitu pengembangan manajemen yang lebih *accountable*, baik dari segi keuangan maupun organisasi pendidikan itu sendiri; *kedua*, peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan pendidikan yang *quality oriented*, yakni pendidikan yang berkualitas dan berkeunggulan, yang pada gilirannya akan mendorong perkembangan madrasah menjadi *centers of excellence*, yang menghasilkan peserta didik yang berparadigma keilmuan komprehensif, yakni pengetahuan umum dan agama, plus imtaq dan *ketiga*, peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan sumber belajar lain yang terdapat dalam masyarakat, sehingga system pendidikan Islam tidak terpisah dari masyarakat Muslim secara keseluruhan.

Dengan UU No. 20 tahun 2003, baru pemerintah memberikan anggaran yang relatif seimbang para sekolah dan madrasah. Pada 2004 anggaran pendidikan bagi para siswa , mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah, hingga Aliyah, memperoleh subsidi dan anggaran yang relatif sama dengan sekolah umum di bawah Depdiknas (Burhanudin, 2006: 42). Madrasah dengan visi dan misi pembangunan nasional, serta pemanfaatan prospek madrasah dengan nilai-nilai yang positif dalam memenuhi tuntutan masyarakat global, maka dapat disusun kurikulum madrasah yang realistis sesuai dengan kebutuhan dinamika masyarakat Indonesia. Menurut Tilaar (2004: 166) konseptual dan prospek madrasah dalam pengembangan kurikulum madrasah memasuki millennium ketiga sebagai berikut:

Gambar  
*Kerangka Konseptual Reposisi dan Reaktualisasi*



Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas Islam sangat menarik perhatian dalam rangka melaksanakan cita-cita pendidikan nasional, karena karakteristik madrasah sangat sesuai dengan cita-cita reformasi. Peranan madrasah sangat menonjol oleh karena: *pertama*, pendidikan madrasah yang selama ini seakan-akan tersisih dari mainstream pendidikan nasional namun berkenaan dengan pendidikan anak bangsa; *kedua*, madrasah sebagai pendatang baru dalam sistem pendidikan nasional relatif menghadapi berbagai masalah dan kendala dalam hal mutu, manajemen, termasuk masalah kurikulumnya. Namun demikian madrasah memiliki potensi yang sarat nilai-nilai budaya bangsa.

Dengan reposisi madrasah yang disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan nasional, serta manfaat dan prospek madrasah

dengan nilai-nilainya yang positif dalam memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia baru dan masyarakat global, maka dapatlah disusun kurikulum madrasah yang realistis sesuai dengan kebutuhan dinamika masyarakat Indonesia.

## **F. Profil Madrasah Bermutu dalam Merespon Pendidikan untuk Semua**

Dalam mewujudkan *quality education*, yayasan yang menjadi pemilik lembaga pendidikan madrasah seyogyanya memberikan ruang gerak lebih besar kepada para pelaksana pendidikan, khususnya kepala madrasah agar: Pertama, dapat mengorganisasi dan memberdayakan sumberdaya yang ada untuk memberikan dukungan yang memadai bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang maksimal, bahkan pengajaran yang cukup, dan pemeliharaan fasilitas yang baik; kedua, dapat berkomunikasi secara teratur dengan pemilik lembaga (yayasan, guru, staf, orangtua siswa, masyarakat, dan pemerintah). Selanjutnya madrasah sudah waktunya dikelola dengan manajemen modern sehingga pendidikan yang diselenggarakannya dapat lebih efisien dan efektif.

Madrasah elite, seperti Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) I Malang, Jawa Timur. Madrasah ini pada mulanya didirikan pada 1962 sebagai sekolah pelatihan swasta bagi siswa-siswa Pendidikan Guru Agama. Namun, pada 1979 Departemen Agama setempat memutuskan untuk menjadikannya sebuah madrasah negeri tersendiri. Sejak saat itu, MIN I Malang memperbaiki dirinya sendiri. Dengan kerjasama yang baik dan dukungan dari POMG (Persatuan Orangtua Murid dan Guru), madrasah ini kini mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas (Azra, 1999: 79). Upaya pemberdayaan madrasah dapat ditempuh melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang peduli terhadap pendidikan madrasah, misalnya perguruan tinggi di daerah dan lembaga-lembaga sosial lain.

Upaya Departemen Agama untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah, melalui Proyek Pengembangan Madrasah Aliyah sebagai madrasah-madrasah model sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan pendidikan bermutu tetapi murah, sehingga masyarakat luas berkesempatan untuk mengikutinya. Hal tersebut sesuai dengan gerakan dunia yang disebut *education for all* yaitu pendidikan telah menjadi kebutuhan pokok di dalam kehidupan manusia, dengan kesadaran bahwa tingkat pendidikan yang rendah tidak dapat membawa manusia kepada kehidupan

yang layak. Untuk merespon gerakan tersebut, di Indonesia antara lain melaksanakan wajib belajar 6 tahun yang telah dicapai pada 1984 dengan penghargaan Aviciena dari UNESCO kepada Presiden Republik Indonesia (Tilaar, 2004: 65). Kesuksesan wajib belajar 6 tahun itu dilanjutkan dengan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun atau wajib belajar sekolah lanjutan pertama.

Madrasah yang telah memiliki visi dan misi baru, serta dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, manajemen dan staf pengajar yang lebih terlatih akan meningkatkan status madrasah sebagai sekolah model dan menjadi percontohan bagi standar pengembangan seluruh madrasah lain di Indonesia. Dengan segala keunggulan yang dimiliki madrasah, tidak sulit memahami popularitas madrasah dan sekolah elite Islam yang terus menanjak, karena muatan nilai-nilai akhlak, demokrasi, dan kepedulian sosial. Dengan rasa bangga dan simpati, kini madrasah bukan hanya merupakan ikon kebanggaan, melainkan juga merupakan salah satu wahana terpenting untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan memelihara kebanggaan dalam diri generasi muda kaum Muslim.

Sebagai lembaga pendidikan yang lahir dari masyarakat, madrasah lebih mudah mengintegrasikan lingkungan eksternal ke dalam organisasi pendidikan, sehingga dapat menciptakan suasana kebersamaan dan kepemilikan yang tinggi di masyarakat. Keterlibatan masyarakat bukan lagi terbatas seperti peranan orangtua siswa (POMG) yang hanya melibatkan diri di tempat anaknya sekolah. Melainkan keterlibatan yang didasarkan kepada kepentingan lingkungan.

Pengembangan madrasah agar menjadi kompetitif, mandiri dan percaya diri bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Selama ini tipe madrasah ideal itu sesungguhnya sudah mulai tampak, muncul di beberapa wilayah nusantara ini. Madrasah yang meraih prestasi itu memang ditopang oleh kekuatan eksternal madrasah, yaitu pemerintah karena lembaga itu berstatus negeri atau didukung oleh yayasan pengelolanya. Sedangkan bagi madrasah yang tidak didukung oleh kekuatan eksternal yang kukuh, keadaannya cenderung berjalan apa adanya. Akan tetapi, oleh karena madrasah menyimpan kekuatan berupa idealisme, cita-cita, semangat mengabdikan, dan berkorban yang luar biasa, maka mereka masih tetap hidup, sekalipun sulit untuk mencapai kemajuan.

## **G. Penutup**

Dari pembahasan di atas, ada beberapa hal penting yang perlu dicatat. *Pertama*, institusi pendidikan Islam yang telah ada sejak sebelum masa kemerdekaan Republik Indonesia mendapat tantangan berat karena tuntutan masyarakat yang terus berubah; yang semakin menuntut madrasah bermutu. Pergeseran nilai yang dipacu oleh tuntutan globalisasi menjadikan madrasah yang memadukan ilmu umum dan ilmu agama semakin mendapat peluang dalam mempersiapkan generasi siap dan mampu menghadapi tantangan zamannya.

*Kedua*, dengan modal moral keagamaan yang kuat, ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang menjadi kebutuhan hidup, maka madrasah sebagai pendidikan berbasis masyarakat akan tetap menjadi pilihan orangtua, tidak saja mengirimkan anaknya masuk ke madrasah, melainkan juga partisipasinya bagi terselenggaranya pendidikan yang bermutu, mampu mendorong penanaman dasar-dasar keunggulan kompetitif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azra, Azyumardi. 1999. *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Burhanudin, Jajat dan Dina Afrianty (ed.). 2006. *Mencetak Muslim Modern, Peta Pendidikan Islam Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Danim, Sudarwan. 2003. *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional RI, *Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
- Fajar, Malik. 1998. *Madrasah dan Tantangan Modernisitas*, Bandung: Mizan.
- Furchan, Arief. 2004. *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia, Anatomi Keberadaan Madrasah dan PTAI*, Yogyakarta: Penerbit Gema Media.
- Ma'arif, Syamsul. 2007. *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Maksum. 2001. *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta:



Logos.

Mastuhu. 1999. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Steenbrink, Karel. 1986, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah*, Jakarta: LP3ES.

Tilaar. 2004. *Pradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta.